

WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang
 Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam
 Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 1091);

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 23 7. Undang-Undang Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen Arsip;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Repulik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Repulik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
- 14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PEDOMAN
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bengkulu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri

- dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- 6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip.
- 7. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
- 8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
- Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.
- 12. Klasifikasi keamanan arsip adalah katagori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
- 13. Klasifikasi akses arsip adalah katagori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan

- arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
- 14. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
- 15. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
- 16. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
- 17. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
- 18. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
- 19. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/ penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
- 20. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
- 21. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi

publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

22. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk menyediakan informasi arsip yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan.

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 dan
- b. pengaturan akses arsip.

BAB II

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

(1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.

(2) Asas gabungan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

- (1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
 - keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
 - c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
 - d. publik dapat mengakses informasi yang dikatagorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- (2) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filling cabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka, dan brangkas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.

- (4) Perangkat lunak sebagaimana tersebut pada ayat (2) meliputi:
 - a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital;
 - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
- (5) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Sistem klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas, sebagai berikut:
 - a. 000 Umum
 - b. 100 Pemerintahan
 - c. 200 Politik
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban
 - e. 400 Kesejahteraan
 - f. 500 Perekonomian
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan
 - h. 700 Pengawasan
 - i. 800 Kepegawaian
 - j. 900 Keuangan

BAB III

PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 7

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri dari:
 - a. pengguna internal yang ada di instansi; dan
 - b. pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 8

(1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari :

- a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah/instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - 2. pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin; dan
 - 3. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
- c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bengkulu.

- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa/ terbuka;
 - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan;dan
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum.

Pasal 9

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, sebagai berikut :

- a. Lampiran I kode angka 000 bidang tugas Umum;
- b. Lampiran II kode angka 100 bidang tugas Pemerintahan;
- c. Lampiran III kode angka 200 bidang tugas Politik;
- d. Lampiran IV kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban:
- e. Lampiran V kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan;
- f. Lampiran VI kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;

- g. Lampiran VII kode angka 600 bidang tugas PekerjaanUmum dan Ketenagakerjaan;
- h. Lampiran VIII kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
- i. Lampiran IX kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian;
- j. Lampiran X kode angka 900 bidang tugas Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.
- (2) Pengamanan fisik dan informasi arsip dalam ayat (1) secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. katagori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
 - katagori arsip terbatas disimpan pada filling cabinet;
 dan
 - c. katagori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (4) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (5) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta informasi arsip.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

> Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2019

> > WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, Cap/dto MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR....53.....

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN

DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BENGKULU.

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

I. UMUM

NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang - Garuda - Bendera Kebangsaan - Daerah - Propinsi - Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	002	Penghargaan - Bintang - Satya Lencana - Samkarya Nugraha - Monumen - Penghargaan secara adat - Penghargaan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	003	Hari Raya/ Besar - Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb - Keagamaan - Idul Fitri - Natal dll - Hari Ulang Tahun (HUT)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	004	Ucapan - Ucapan Terima kasih - Ucapan Selamat - Ucapan Bela sungkawa - Ucapan lainnnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	005	Undangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	006	Tanda Jabatan - Pamong Praja - Tanda Pengenal - Pejabat lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM				
	011	Gedung Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	012	Rumah Dinas - Tanah untuk rumah dinas - Perabotan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	013	Mess/Guest House	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	014	Rumah Susun/Apartemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	015	Penerangan Listrik/Jasa Listrik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	016	Telepon/Faximili/Internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	017	Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	018	Kebersihan Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	019	Protokol - Upacara Bendera - Tata tempat - Pemasangan gambar - Presiden dan Wakil - Presiden - Audiensi - Alamat-alamat Kantor dan - Pejabat - Sambutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	020	PERALATAN				
		- Penawaran, Ekspose	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	021	Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	022	Mesin Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	023	Pejabat Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	024	Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	025	Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	026	Senjata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	027	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	030	KEKAYAAN DAERAH				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN/DOKUMENT	ASI/KEARSIPAN/SANDI			
	041	Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi - Foto - Audio - Video		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	045	Kearsipan - Pola Klasifikasi - Penataan Berkas - Penyusutan Arsip - Pembinaan Kearsipan - Pemeliharaan/perawatan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	046	Sandi - Peralatan	Rahasia	Eselon III	Memilikidampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis

6	050	PERENCANAAN				
		 REPELITA Pelita Daerah Bantuan Pembangunan Daerah Bappeda Perencanaan/ Proyek bidang peralatan Bidang Perpustakaan Bidang Kearsipan Bidang Sandi Organisasi/ Ketatalaksanaan Penelitian 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag.
	051	Bidang Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	052	Bidang Politik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	053	Bidang Keamanan Ketertiban	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	057	Bidang Penmgawasan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	058	Bidang Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	059	Bidang Keuangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
7	060	ORGANISASI/KETAT	CALAKSANAAN			
	061	Organisasi pemerintah - Sususnan dan tatakerja - Tata tertib Kantor, jam kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	065	Ketatalaksanaan/ tata naskah/Sistem	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	066	Stempel Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	067	Pelayanan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	068	Komputerisasi/ Siskomendagri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
	071	Riset	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	072	Survey	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	073	Kajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	075	Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	076	Non Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	077	Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	078	Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	079	Kecamatan/Kelurahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
9	080	KONFERENSI				
	081	Gubernur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	082	Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	083	Komponen eselon lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	084	Instansi Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	085	Internasional di dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	086	Internasional di luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
10	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	092	Perjalanan Menteri ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampakyang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	097	Perjalanan Menteri ke luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

099 Perjalanan Pegawai ke Lua Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
---	----------	------------	--	---------------

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN

DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BENGKULU.

II. PEMERINTAHAN

NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	130	PEMERINTAH KOTA				
	131	Walikota meliputi				
		- Pencalonan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang Mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	- Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Meninggal	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang Mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Memori Kepala Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang Mengganggu kinerja	Bidang Teknis
131	Sambutan/Pengarahan/ Amanat	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
132	Wakil Walikota meliputi				
	- Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Pengangkatan,	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Pelantikan,	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Pemberhentian,	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang Mengganggu kinerja	Bidang Teknis

133	Sekretaris Daerah Kota Meliputi				
	- Pencalonan,	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Pengangkatan,	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Meninggal	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Pelantikan,	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Pemberhentian,	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Muspida	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Forum BAN (Badan Anggaran Nasional)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Forum Koordinasi lainnya	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Teknis
	Kerjasama Antar Kota	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja	Bidang Teknis

135	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang Mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Wilayah Pembantu Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang Mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Ibukota/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan.	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
136	Pembagian Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
137	Penyerahan Urusan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
138	Pemerintah Wilayah Kecamatan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Sambutan/Pengarahan/ Amanat	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Kecamatan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Perwakilan Kecamatan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	139	Laporan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Monitoring	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Evaluasi	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
2	140	PEMERINTAHAI	N KELURAHAN			
	141	Perangkat Kelurahan, meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Perangkat Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	143	Kekayaan Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Kelurahan, Dewan Marga, Rembug Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

146	Kewilayahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemekaran Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Perubahan Nama Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Kerjasama antar Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
147	Lembaga-lembaga Tingkat Kelurahan, jangan klasifikasikan di sini, lihat 410 dengan Perinciannya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Kepala Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Rukun Tetangga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Warga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	170	DPRD KOTA				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pencalonan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	172	Perdagangan - Reses	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	173	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	174	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	180	HUKUM				
		Konstitusi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Dasar Hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Undang Undang Dasar	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Garis Besar Haluan Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Amnesti, Abolisi, dan Grasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	181	Perdata	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Tanah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	182	Pidana	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	183	Peradilan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Bantuan Hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

184	Hukum Internasional	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
185	Imigrasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Visa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pasport	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Exit	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Reentry	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Lintas Batas/Batas antar Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
186	Rumah Tahanan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
187	Kejaksaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
188	Peraturan Perundang- undangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Peraturan Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Peraturan Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Keputusan Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	189	Kerjasama dengan Lembaga Asing	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
--	-----	-----------------------------------	----------	-------------	--	---------------

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN

DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BENGKULU.

III. POLITIK

NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	200	POLITIK				
		Kebijakan UmumOrde BaruReformasi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
2	210	KEPARTAIAN Meliputi : pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pembubaran	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		Lambang PartaiKartu Tanda AnggotaAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

		Bantuan keuangan ParpolRapat Koordinasi konsolidasi partai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	Berdasarkan Perjuangan Berkas tentang perjuangan perintis kemerdekaan Berkas tentang perjungan angkatan 45 Berkas tentang perjuangan Veteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	222	Berdasarkan Kekaryaan Kekaryaan Pepabri Kekaryaan Wredatama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	223	Berdasarkan Kerohanian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	224	Lembaga Adat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	230	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	231	Berdasarkan Perjuangan Berkas tentang perjuangan perintis kemerdekaan Berkas tentang perjuangan angkatan 45 Berkas tentang perjuangan Veteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

232	Berdasarkan Kekaryaan Kekaryaan Pepabri Kekaryaan Wredatama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
233	Berdasarkan Kerohanian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	Lembaga Adat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
234	Persatuan Advokat Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
235	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
236	Korps Pegawai Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
237	Persatuan Wartawan Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
238	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	239	Organisasi Profesi dan fungsional lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	240	ORGANISASI PEMUDA				
	241	Organisasi Kepemudaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	242	Organisasi Mahasiswa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	243	Organisasi Pelajar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	244	Organisasi Pemuda Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAY	YAN DAN ANGKUT	AN		
	251	Organisasi Buruh Nasional	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	252	Organisasi Buruh Internasional	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	253	Organisasi Tani	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	
	254	Organisasi Nelayan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	255	Organisasi Angkutan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	260	ORGANISASI WANITA				
	261	Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	262	Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	263	Pemberdayaan Perempuan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	264	Konggres Wanita	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	265	Organisasi Wanita Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

9	270	PEMILIHAN UMUM				
	271	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	272	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	273	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	274	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	275	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	276	Sarana Sarana TPS, Sarana kendaraan Surat suara, Kotak suara	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	277	Pemungutan suara / Penghitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	278	Pengambilan sumpah/janji anggota MPR, DPR, DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

10	280	PILKADA				
	281	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	C
	282	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	C
	283	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	284	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	285	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	286	Sarana Sarana TPS, Sarana kendaraan Surat suara, Kotak suara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	287	Pemungutan suara/Penghitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	288	Pengambilan sumpah/janji anggota MPR,DPR,DPD	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

1	290	KOMISI PEMILIHAN UMUM/ BAWASLU				
	291	Panwaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN

DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BENGKULU.

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	300	KEAMANAN/KETERTIBAN				
	301	Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	Penertiban PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	303	PSK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	304	Gepeng	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	305	PPNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
2	310	PERTAHANAN				
	311	- Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang, Seksi, Subbag
	312	- Laut	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	313	- Udara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	314	- Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
3	320	KEMILITERAN				
	321	Latihan Militer	Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	322	Wajib Militer	Terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	323	Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	324	Kekayaan ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis

	325	Pejabat Sipil dari ABRI/TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
4	330	KEAMANAN				
	331	Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	332	Huru hara/ demontrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	333	Senjata api/ senjata tajam	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	334	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	335	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	336	Surat surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	337	Pengaduan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	338	Himbauan / larangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

5	340	PERTAHANAN SIPIL				
	341	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	350	KEJAHATAN				
	351	Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	352	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	353	Penganiayaan, pencurian dan perampasan	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	354	Subversi/Penyelundupan/ Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	355	Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu	Bidang Teknis
	356	Korupsi/Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	357	Perkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	358	Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	359	Kajahatan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang Dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	360	BENCANA				
	361	Gunung berapi / gempa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	362	Banjir / tanah longsor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	363	Angin Topan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	364	Kebakaran - Pembinaan, - Penanggulangan, - Pencegahan - Pemadaman - Pengujian instalasi - Antisipasi - Proteksi, APAR - Kebutuhan sarpras	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	365	Kekeringan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	366	Tsunami	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	370	KECELAKAAN SAR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
			Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	371	Darat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

372	Udara	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
373	Laut	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
374	Sungai /danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BENGKULU.

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PD/unit kerja	Bidang Teknis
	402	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PD/unit kerja	Bidang Teknis
	403	Raskin	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/ unit kerja	Bidang Teknis
	404	Askeskin	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/ unit kerja	Bidang Teknis

	405	Jamkessos/Jamkesda	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/ unit kerja	Bidang Teknis
2	410	PEMBANGUNAN KELURAHAN				
3	411	PEMBINAAN USAHA GOTONG-RO	OYONG			
		 a. Swadaya Gotong-Royong 1) Penataan gotong-royong 2) Gotong-Royong dinamis 3) Gotong-Royong statis 4) Pungutan 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		 b. Lembaga Sosial Kelurahan 1) Pembinaan, 2) Klasifikasi, 3) Proyek, 4) Musyawarah desa 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Latihan Kerja Masyarakat 1) Kader masyarakat, 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN), 3) Pusatlatihan, 4) Kursus-kursus, 5) Kurikulum/syllabus, 6) Keterampilan, 7) Pramuka	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Lembaga pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		e. Badan keswadayaan Masyarakat (BKM)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

					PD/unit kerja	
		f. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 1) Program, 2) Pembinaanorganisasi, 3) Kegiatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidakmemiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		 g. Penyuluhan 1) Publikasi, 2) Peragaan, 3) Sosiodrama, 4) Siaran kelurahan, 5) Penyuluhan lapangan 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		h. Kelembagaan Kelurahan 1) Kelompok tani, 2) Rukuntani 3) Subak 4) Dharma Tirta	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
4	412	PEREKONOMIAN KELURAHAN				
		a. Produksi Kelurahan 1) Pengolahan 2) Pemasaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Keuangan Kelurahan 1) Perkreditan kelurahan, 2) Inventarisasi data, 3) Perkembangan/ pelaksanaan, 4) Bantuan/stimulans 5) Petunjuk/pembinaan pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

c.	Koperasi Desa 1) Badan Usaha Kelurahan 2) Koperasi Kelurahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
d.	Penataan Bantuan Pembangunan Kelurahan 1) Jumlah kelurahan diberi bantuan 2) Pengarahan 3) Pusat 4) Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
e.	Alokasi Bantuan Pembangunan Kelurahan 1) Pusat 2) Daerah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
f.	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kelurahan 1) Bantuan langsung, 2) Bantuan keserasian, 3) Bantuan juara lomba kelurahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
g.	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Berkas tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

5	413	PRASARANA KELURAHAN				
		a. Prasarana Kelurahan1) Pembinaan2) Bimbingan teknis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Pemukiman Kembali Penduduk 1) Lokasi 2) Diskusi 3) Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Masyarakat Kelurahan 1) Pembinaan 2) Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Kelurahan 1) Rumah sehat 2) Proyek perintis 3) Pelaksanaan 4) Pengembangan 5) Perbaikan kampung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
6	414	PENGEMBANGAN KELURAHAN				
		a. Tingkat Perkembangan Kelurahan 1) Jumlah kelurahan 2) Pemekaran kelurahan 3) Pembentukan kelurahan baru, 4) Evaluasi, 5) Bagan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		b.	Unit Kelurahan Kerja Pembangunan 1) Penyuluhan program, 2) Lokasi, 3) Pelaksanaan, 4) Bimbingan/pembinaan, 5) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.	Tata Kelurahan 1) Inventarisasi, 2) Penyusunan pola tata kelurahan, 3) Aplikasi tata kelurahan, 4) Pemetaan, 5) Pedoman pelaksanaan, 6) Evaluasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.	Perlombaan Kelurahan 1) Pedoman, 2) Penilaian, 3) Kejuaraan, 4) Piagam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
7	415	KOO	ORDINASI				
		a.	Sektor Khusus Berkas tentang koordinasi sektor khusus di Pemerintah Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		Berkas tentang rapat koordinasi horizontal dengan lembaga di lingkungan internal dan eksternal Pemerintah				
		c. Tim Koordinasi Pusat (TKP) Berkas tentang tim	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		koordinasi pusat			Kerja	
		d. Kerjasama1) Luar negeri (UNICEF),2) Perguruan tinggi,3) Departemen/lembaga non departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
8	420	PENDIDIKAN				
9	421	SEKOLAH				
		a. Pra Sekolah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Sekolah Dasar/Sederajat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Sekolah Menengah/ Sederajat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Sekolah Tinggi/Sederajat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		e. Sekolah Kejuruan/ Sederajat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		f. Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		g. Kegiatan Pelajar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		h Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		i. Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
10	422	ADMINISTRASI SEKOLAH				
		a. Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Tahun Pelajaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Hari Libur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Uang Sekolah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		e. Bea Siswa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		f. Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
11	423	METODE BELAJAR				
		a. Kuliah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Ceramah, simposium	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Diskusi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tour	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		e. Kurikulum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		f. Karya Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		g. Ujian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

12	424	TENAGA PENGAJAR Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rector dan guru teladan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
13	425	SARANA PENDIDIKAN				
		a. Gedung1) Gedung sekolah,2) Kampus3) Pusat kegiatanmahasiswa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Buku Berkas tentang buku pelajaran dan diktat kuliah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Perlengkapan Sekolah Berkas tentang perlengkapan sekolah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidakmemiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
14	426	KEOLAHRAGAAN				
		a. Cabang Olah Raga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Sarana 1) Gedung olah raga, 2) Stadion, 3) Lapangan, 4) Kolam renang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		c. Pesta Olah Raga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. KONI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
15	427	KEPEMUDAAN Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organisasi pemuda, kegiatan remaja dan gelanggang remaja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
16	428	KEPRAMUKAAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
17	429	PENDIDIKAN KEDINASAN DEPD	AGRI			
18	430	KEBUDAYAAN				
19	431	KESENIAN				
		a. Cabang Kesenian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Sarana Berkas tentang gedung kesenian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
20	432	KEPURBAKALAAN				
		a. Museum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		b. Peninggalan Kuno 1) Candi, termasuk pemugaran 2) Benda peninggalan kuno	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
21	433	SEJARAH	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
22	434	BAHASA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
23	435	USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENANGAN Berkas tentang usaha pertunjukan, hiburan, dan kesenangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
24	436	KEPERCAYAAN Berkas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
25	440	KESEHATAN				
26	441	PEMBINAAN KESEHATAN				
		 a. Gizi Mata b. Jiwa c. Kanker d. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) f. Perawatan g. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) h. Pekan Imunisasi Nasional 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

27	442	OBAT-OBATAN				
		a. Pengadaan b. Penyimpanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PD/unit kerja	Bidang Teknis
28	443	PENYAKIT MENULAR				
		a. Pencegahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kusta 2) Kelamin 3) Frambosia 4) TBC/AIDS/HIV				
		c. Epidemilogi dan Karantina (Epidka) 1) Kholera 2) Imunisasi 3) Survailense 4) Rabies/anjing gila, Antraks	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		1) Malaria 2) Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF) 3) Filaria 4) Serangga				
		e. Hygiene Sanitasi 1) Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TPPMM) 2) Sarana air minum dan jamban Keluarga (Samijaga) 3) Pestisida	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
29	444	GIZI				
		a. Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan, b. Busung Lapar c. Keracunan d. Makanan Menu e. Makanan Rakyat Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PD/unit kerja	Bidang Teknis
30	445	RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, POLIKLINIK, POSYANDU	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidakmemiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

31	446	TENAGA MEDIS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
32	447	ALAT MEDIS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
33	448	PENGOBATAN TRADISIONAL				
		 a. Pijat b. Tusuk jarum c. Jamu tradisional/ herbal d. Dukun/paranormal 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
34	450	AGAMA				
35	451	ISLAM				
		 a. Peribadatan 1) Sholat 2) Zakat,Fitrah 3) Puasa 4) MTQ 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Rumah Ibadah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Tokoh Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Pendidikan 1) Tinggi 2) Menengah 3) Dasar 4) Pondok Pesantren	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		5) GedungSekolah 6) TenagaPengajar 7) Buku 8) Dakwah				
		9) Organisasi/Lem baga Pendidikan				
		e. Harta Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		f. Peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		g. Organisasi Keagamaan Bukan Politik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		h Mazhab	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PD/unit kerja	Bidang Teknis
36	452	KRISTEN PROTESTAN				
		 a. Peribadatan Rumah b. Ibadah c. Tokoh agama, d. rohaniawan, pendeta, e. domine Mazhab Organisasi gerejani 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

37	453	KHATOLIK				
		 a. Peribadatan b. Rumah ibadah c. Tokoh agama, rohaniawan, d. pastor Mazhab e. Organisasi gerejani 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
38	454	HINDU				
		a. Peribadatanb. Rumah ibadahc. Tokoh agama, rohaniawand. Mazhabe. Organisasi keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
39	455	BUDHA				
		 a. Peribadatan b. Rumah ibadah c. Tokoh agama, rohaniawan d. Mazhab e. Organisasi keagamaan 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
40	456	URUSAN HAJI				
		a. ONH b. Umroh c. Manasik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	
41	460	SOSIAL				
42	461	REHABILITASI PENDERITA CAC	AT			
		a. Cacat Matab. Cacat tubuhc. Cacat mental	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	

		d.	Bisu tuli				
43	462	TUN	NA SOSIAL				
		a. b.	Gelandangan Pengemis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit	Bidang Teknis
		c.	Tuna susila			kerja	
		d.	Anak nakal/anak jalanan				
44	463		SEJAHTERAAN AK/KELUARGA				
		a. b. c. d.	Anak Putus Sekolah Ibu teladan Keluarga sakinah Anak asuh	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
45	464	PEN	IBINAAN PAHLAWAN				
		a. b. c.	Pahlawan Perintis kemerdekaan Cacat veteran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
46	465	KES	SEJAHTERAAN SOSIAL				
		a. b.	Lanjut Usia Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidakmemiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
47	466	SUN	MBANGAN SOSIAL				
		a. b. c. d.	Korban Bencana Pencarian Dana untuk Sumbangan Panti Asuhan Panti Jompo	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

48	467	BIMBINGAN SOSIAL Berkas tentang bimbingan, pendidikan, kesehatan, dan pemukiman untuk masyarakat suku terasing	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
49	468	PMI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
50	469	MAKAM				
		a. Umumb. Pahlawanc. Khusus keluarga rajad. Krematorium	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
51	470	KEPENDUDUKAN				
52	471	PENDAFTARAN PENDUDUK				
		a. Identitas Penduduk 1) Biodata 2) Nomor Induk Kependudukan 3) Kartu Tanda Penduduk 4) Kartu Keluarga 5) Advokasi Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PD/unit kerja	Bidang Teknis
		 b. Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia 1) Perpindahan penduduk WNI 2) Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia 	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		3) Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara4) Daerah terbelakang Bedol desa				
		c. Perpindahan Penduduk Antar Negara 1. Penduduk Indonesia ke luar negeri 2. Orang asing tinggal sementara 3. Orang asing tinggal tetap 4. Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar Negara (pelintas batas tradisional)	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		 d. Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan 1) Akibat bencana alam 2) Akibat kerusuhan sosial 3) Pendaftaran penduduk daerah terbelakang 4) Pendaftaran penduduk rentan 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PD/unit kerja	Bidang Teknis
53	472	PENCATATAN SIPIL				
		a. Kelahiran, Kematian, dan Advokasi 1) Kelahiran 2) Kematian	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

	3) Advokasi kelahiran dan kematian 4) Perkawinan, perceraian dan Advokasi				
b.	Perkawinan Agama Islam 1) Perkawinan agama non Islam 2) Perceraian agama Islam 3) Perceraian agama non Islam 4) Advokasi perkawinan dan perceraian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PD/unit kerja	Bidang Teknis
С.	Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi 1) Pengangkatan anak 2) Pengakuan anak 3) Pengesahan anak 4) Perubahan akta 5) Pembatalan akta Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dna pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PD/unit kerja	Bidang Teknis
d.	Pencatatan Kewarganegaraan 1) Akibatperkawinan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

	1.50	2) Akibatkelahiran 3) Nonperkawinan 4) Nonkelahiran 5) Perubahan WNI keWNA 6) Perubahan WNA keWNI				
54	473	INFORMASI KEPENDUDUKAN				
		a. Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
		1) Perangkat keras 2) Perangkat lunak 3) Jaringan komunikasi data			mengganggu kinerja PD/unit kerja	
		b. Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi 1) Daerah maju 2) Daerah berkembang 3) Daerah terbelakang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Pengolahan Data Kependudukan 1) Pendaftaran penduduk 2) Kejadian vital penduduk 3) Penduduk non registrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas PD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Pelayanan Informasi Kependudukan 1) Media elektronik 2) Media cetak 3) Outlet	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
55	474	PERKEMBANGAN PENDUDUK				
		a. Pengarahan Kuantitas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang	Bidang Teknis

	Penduduk 1) Struktur jumlah 2) Komposisi 3) Fertilitas 4) Kesehatan reproduksi 5) Morbiditas penduduk 6) Mortalitas penduduk			mengganggu kinerja PD/unit kerja	
b.	Pengembangan Kuantitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit	Bidang Teknis
	1) Anak dan remaja 2) Penduduk usia produktif 3) Penduduk lanjut usia 4) Gender			kerja	
c.	Penataan Persebaran Penduduk 1) Migrasi antar wilayah 2) Migrasi internasional 3) Urbanisasi 4) Sementara 5) Migrasi non permanen	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
d.	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 1) Pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) Pelayanan kelembagaan ekonomi 3) Pelayanan kelembagaan sosial budaya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		4) Partisipasi masyarakat				
		e. Pengembangan Wawasan Kependudukan 1) Pendidikan jalur sekolah 2) Pendidikan jalur luar sekolah 3) Pendidikan jalur masyarakat 4) Pembangunan berwawasan kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
56	475	PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN				
		a. Indikator Kependudukan 1) Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan 2) Pemanfaatan indikator kependudukan Sosialisasi indikator kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Proyeksi Penduduk 1) Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2) Pemanfaatan proyeksi kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

		c. Analisis Dampak Kependudukan 1) Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 2) Pemanfaatan analisis dampak kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		 d. Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah 1) Lembaga internasional, 2) Lembaga masyarakat dan nirlaba, 3) Lembaga usaha swasta 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		e. Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah 1) Lembaga pemerintah 2) Pemerintah provinsi dan kota 3) Pemerintah kabupaten	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
		f. Analisis Berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
57	476	MONITORING	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
58	477	EVALUASI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
59	478	DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

60	479	KELUARGA BERENCANA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
61	480	MEDIA MASSA				
62	481	PENERBITAN 1) Suratkabar 2) Majalah 3) Buku 4) Penerjemahan 5) Buletin 6) Jurnal 7) Kliping	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
63	482	RADIO 1) RRI 2) Non RRI 3) Radio luar negeri 4) Radio internet	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
64	483	TELEVISI 1) TVRI 2) Swasta lokal, nasional, 3) Luar negeri 4) Televisi internet	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
65	484	FILM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

66	485	PERS 1) Kewartawanan, 2) Wawancara 3) Informasi nasional	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
67	486	GRAFIKA Berkas tentang grafika/cetak buku	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
68	487	PENERANGAN Berkas tentang pameran non komersil	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
69	488	OPERATION ROOM Berkas tentang operation room terkait media massa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
70	489	HUBUNGAN MASYARAKAT Berkas tentang hubungan masyarakat terkait media massa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN

DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BENGKULU.

VI. PEREKONOMIAN

NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	500	PEREKONOMIAN • Dewan Stabilisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
	501	PENGADAAN PANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
	502	PENGADAAN SANDANG	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
	503	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada maslahnya (IMB, SIUP, TDP, HO, TDG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

2	510	PERDAGANGAN / TATA NIAGA				
		Promosi Perdagangan - Pekan Raya - Iklan - Pameran/Ekspokomersil - Pelelangan - Tera/Timbang - Ulang/Kalibrasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	511	Pemasaran - Sembilan BahanPokok - PasarTradisional - PasarModern - Pertokoan, Kaki Lima, Kios	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	512	EKSPOR	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	513	IMPOR	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	514	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	515	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	516	PERGUDANGAN TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK GORENG	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	517	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

518	KOPERASI (UNTUK BUUD, KUD, KUR)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
520	PERTANIAN				
520	PERTANIAN Tanaman Pangan - Program - Bimas/Inmas termsuk kredit - Penyuluhan - Produksi - Padi/Panen - Palawija - Jagung - Ketela Pohon/Ubi-ubian - Hortikultura - Sayuran/Buah-buahan - TanamanHias - Pembudidayaan Rumput Laut - Saran UsahaPertanian - Peralatan - Pembibitan - Pupuk - PerlindunganTanaman - Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang - Hama-hama serangga, wereng, Walang sangit, tungro, hama tikus	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	dansejenisnya - Pemberantasan hama, meliputi : penyemprotan, penyiangan, geropyokan, sprayer, pemberantasan melalui udara	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Pestisida	Biasa/Terbuka	Eselon III		

	- Tanah Pertanian Pangan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Persawahan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Perladangan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Kebun	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Rumpon Ikan Laut	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- KTA/Lahan Kritis	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Pengusaha Petani	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Bina Usaha	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Pasca Panen	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Pemasaran Hasil	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Kelompok tani	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Rukun tani	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	110,112,111	,			
522	Kehutanan				
	- Program				
	- Hak Pengusahaan Hutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang	Bidang Teknis
	- Tata GunaHutan	Terbatas	Eselon III	dapat mengganggu	
	- PerpetaanHutan	Terbatas	Eselon III	pelaksanaan fungsi dan	
	- Tumpangsari	Terbatas	Eselon III	tugas lembaga daerah	
	- Produksi				
	- Kayu	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Non Kayu	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Sarana Usaha Kehutanan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Penghijauan, Reboisasi	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Kelestarian				
	- Cagar Alam, Margasatwa,	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	Suaka Margasatwa				
	- Berburu, meliputi larangan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	dan izin berburu				
	- Kebun Binatang	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Konservasi Lahan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Penyakit/Hama				
	- Jenis-jenis hutan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Hutan Hidup	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Hutan Wisata	Biasa/Terbuka	Eselon III		

	- Hutan Produksi	Biasa/Terbuka	Eselon III		
	- Hutan Lindung	Biasa/Terbuka	Eselon III		
523	Perikanan - Program - Penyuluhan - Teknologi - Produksi - Pelelangan - Usaha Perikanan - Pembibitan - Daerah Penangkapan - Pertambakan, meliputi: tambak ikan deras, tambak udang dan lain-lain - Sarana - Peralatan - Kapal	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Kapai - Pelabuhan	Biasa/Terbuka	Eselon III		
524	Peternakan - Produksi - Susu ternakrakyat - Telur - Daging - Kulit - Sarana Usaha Ternak - Pembibitan - Kandang ternak - Kesehatan Hewan - Penyakit Hewan - Pos Kesehatan Hewan - TesiPullorum - Karantina - Pemberantasan Penyakit - Hewan termasuk upaya - pencegahannya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	 Perunggasan PengembanganTernak Inseminasi Buatan Pembibitan/Bibit Unggul Penyebaran Ternak Makanan Ternak Tempat Pemotongan Hewan Data Peternakan 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III		
525	Perkebunan - Program - Produksi - Karet - Teh - Tembakau - Tebu - Cengkeh - Kopra - Kopi - Cokelat - Aneka Tanaman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
530	Perindustrian - Undang-undang Gangguan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
531	Industri Logam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
532	Industri Mesin/Elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
533	Industri Kimia/Farmasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	534	Industri Tekstil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	535	Industri Makanan/Minuman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	536	Aneka Industri/Perusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	537	Aneka Kerajinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	538	Usaha Negara/BUMN - Perusahaan Jawatan - Perusahaan Umum - Persero/PT, CV, UD,Firma	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	539	Perusahaan Daerah/BUMD	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pertambangan/Kesamuderaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	540	PERTAMBANGAN/ KESAMUDERA	AN			
	541	BBM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	542	Gas Bumi - Eksploitasi/Pengeboran - Kontrak Kerja - Pengolahan Tangki, Pompa Tanker	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

54	Logam Mulia - Emas - Intan/Batu Mulia - Perak	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
54	Logam - Timah - Aluminium,Boxit - Besi, termasuk besitua - Tembaga	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
54	Aneka Tambang - batubara	terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
54	Geologi - Vulkanologi - Pengawasan Gunung Berapi - Sumur Artesis, air Bawah Tanah	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
54	7 Hidrologi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
54	8 Kesamuderaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
55) PERHUBUNGAN				
	Perhubungan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
55	Perhubungan Darat - Lalu lintas Jalan Raya, Sungai, Danau - Keamanan Lalu lintas, rambu- rambu	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	554	 Angkutan Jalan Raya Perizinan Alatangkutan Terminal Perkeretaapian Pos	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	555	Telekomunikasi - Telepon,HT - Telegram - Telex/SSB, Faximile - Satelit, Internet - Stasiun Bumi, Parabola - Menara Telekomunikasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	556	Pariwisata dan Rekreasi - Obyek Kepariwisataan - Perhotelan - Travel Service - Tempat Rekreasi - Tempat sejarah/monumen	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	557	Meteorologi - Ramalan Cuaca - Curah Hujan - Kemarau Panjang	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
7	560	TENAGA KERA Tenaga Kerja - Pengangguran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	561	Upah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

562	Penempatan Tenaga Kerja, TKI - Outsourching	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
563	Latihan Kerja, Magang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
564	Tenaga Sukarela - Butsi - Padat Karya	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
565	Perselisihan Perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
566	Keselamatan Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
567	Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
568	Kesejahteraan Buruh (Kesehatan, Perumahan, dll.)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
569	Tenaga Orang Asing	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

8	570	PERBANKAN / MONETER				
		Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	571	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	572	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	573	Modal Patungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	574	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	575	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	576	Perbankan/Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

9	580	Perbankan/Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	581	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	582	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	583	Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	584	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	585	Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	586	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	587	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	588	Hutang Negara, Obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	589	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
10	590	Agraria	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	591	Tata Guna Tanah - Pemetaan dan Pengukuran - Perpetaan - Penyediaan Data - Fatwa Tata Guna Tanah - Tanah Kritis	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	592	Landreform - Redistribusi - Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan - Penentuan Tanah Obyek Landreform - Pembagian Tanah Obyek Landreform - Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform - Ganti Rugi - Ganti Rugi Tanah Kelebihan, meliputi Sengketa ganti rugi tanah kelebihan	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	- Ganti Rugi Tanah Absentee, meliputi Sengketa ganti rugi tanah	Terbatas	Eselon III		
	absentee - Ganti Rugi Tanah Partikelir, meliputi Sengketa ganti rugi tanah partikelir	Terbatas	EselonIII		
	 Bagi Hasil Penetapan Imbangan Bagi Hasil Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Sengketa Perjanjian Bagi Hasil 	Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III		
	 Gadai Tanah Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah Pelaksanaan Gadai Tanah 	Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III EselonIII		
	 Sengketa Gadai Tanah Bimbingan dan Penyuluhan Pengembangan Yayasan Dana Landreform (YDL) 	Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III		
593	Pengurusan Hak-hak Tanah - Penyusunan Program dan	Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Bidang Teknis
	Bimbingan Teknis - Sewa Tanah - Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu; tebu, tembakau, rosella, corchorus - Hak Milik	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III	dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	
	Hak MilikPeroranganBadan HukumHak Pakai	Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III		

-	Perorangan, Warga Negara	Terbatas	Eselon III	
	Indonesia (WNI)	Terbatas	Eselon III	
-	Perseorangan, Warga Negara	Terbatas	Eselon III	
	Asing (WNA)	Terbatas	Eselon III	
-	Badan Hukum	Terbatas	Eselon III	
-	Badan Hukum Indonesia	Terbatas	Eselon III	
-	Badan Hukum Asing,	Terbatas	Eselon III	
	Kedutaan, Konsulat Kantor	Terbatas	Eselon III	
	Dagang Asing	Terbatas	Eselon III	
-	Tanah Gedung-gedung Negeri	Terbatas	Eselon III	
-	Guna Usaha			
-	Perkebunan Besar	Terbatas	Eselon III	
-	Perkebunan Rakyat	Terbatas	Eselon III	
-	Peternakan	Terbatas	Eselon III	
-	Perikanan			
-	Kehutanan			
-	Hak Guna Bangunan	Terbatas	Eselon III	
-	Perorangan			
-	Badan Hukum	Terbatas	Eselon III	
-	P3MB (Panitia Penguasaan Milik	Terbatas	Eselon III	
	Belanda)			
-	Badan Hukum Asing Belanda-	Terbatas	Eselon III	
	PRKNo.5165			
-	Pemulihan Hak (PerPres4/1960)	Terbatas	Eselon III	
-	Hak Pengelolaan			
-	PN Perumnas, Bonded		Eselon III	
	Ware House, Industrial	m 1		
	Estate, Real Estate	Terbatas	Eselon III	
-	Perusahaan Daerah	Terbatas	Eselon III	
	Pembangunan Perumahan			
-	Sengketa Tanah			
-	Peradilan Perkara Tanah (lihat	77) 1 /	5 1 777	
	klasifikasi 183)	Terbatas	Eselon III	
-	Pencabutan dan	Terbatas		
	PembebasanTanah	77) 1 ·	D 1 ***	
-	Pencabutan Hak	Terbatas	Eselon III	

	- Pembebasan Tanah - Ganti Rugi Tanah	Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III		
594	Pendaftaran Tanah - Pengukuran/Pemetaan - Fotogrametri - Terristis - Triangulasi - Peralatan - Dana Pengukuran (PerMen AgrariaNo.61/1965) - Sertifikat - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) - Ajudikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
595	Lahan Transmigrasi - Tata Guna Tanah - Landreform - Pengurusan Hak-hak Tanah - Pendaftaran Tanah	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
596	- Tanah kosong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN

DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BENGKULU.

VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

NO	KLASIFI KASI	KLASIFIKASI KEAMANAN		HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Tata Bangunan Konstruksi, dan Industri Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit Kerja	Bidang teknis
	602	Kontraktor Pemborong - Tender /lelang - Penunjukan langsung - Prakualifikasi • Daftar Rekanan Mampu (DRM) • Tanda Daftar Rekanan (TDR)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
	603	Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak Yang mengganggu kinerja PD/unit Kerja	Bidang Teknis

604	Bahan Bangunan Tanah dan batu Aspal, Aspal buatan, Aspalalam Besi dan logam lainnya Besi beton Besiprofil Paku Alumunium, profil Bahan-bahan perlindungan dan pengawet Semen Kayu seperti balok, papan, dolken Bahan penutup atap Alat-alat penggantung dan pengunci Bahan-bahan bangunan lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki Dampak yang mengganggu kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
605	Instalasi - Instalasi bangunan - Instalasi listrik - Instalasi air sanitasi - Instalasi pengatur udara - Instalasi akustik - Instalasi cahaya / penerangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memilik dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan kinerja PD/unit kerja	Bidang Teknis
606	Konstruksi Pencegahan - Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran - Konstruksi pencegahan terhadap gempa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

		 Konstruksi pencegahan terhadap angina udara Konstruksi pencegahan terhadap kegaduhan Konstruksi pencegahan terhadap gas/explosive Konstruksi pencegahan terhadap serangga Konstruksi pencegahan terhadap serangga Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom 				
2	610	Irigasi - Bangunan waduk - Bendungan - Tanggul - Pelimpahan banjir - Menara pengambilan - Bangunan pengambilan - Bendungan - Bendungan dengan pintubilas - Bendungan denganpompa - Pengambilan bebas - Pengambilan bebas - Pengambilan bebas dengan pompa - Sumur dengan pompa - Kantong lumpur - Siltekstraktor - Escape Channel - Bangunan pembawa - Saluran - Bangunan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	 BoxTersier Got miring Talang Syphon Gorong-gorong Pelimpah samping Bangunan Pembuang Saluran Bangunan Gorong-gorong pembuang Talang pembuang Talang pembuang Syphon pembuang Bangunan lainnya Jalan Jembatan Tanggacuci Kubangan kerbau Waduk lapangan Bangunan penunjang Jaringan telepon Stasiun agro 				
611	Folder: - Tanggul keliling - Tanggul - Bangunan penutup sungai - Jembatan - Bangunan pembawa - Saluran - Stasiun pompa pemasukan - Bangunan bagi - Gorong-gorong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	 Syphon Bangunan pembuang Stasiun pompa pembuang Saluran Pintu air pembuangan Gorong-gorong pembuangan Syphon pembuangan Bangunan lainnya Bangunan Rumah petugas eksploitasi 				
612	Folder: Tanggulkeliling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan pembawa Saluran Stasiun pompa pemasukan Bangunanbagi Gorong-gorong Syphon Bangunan pembuang Stasiun pompa pembuang Stasiun pompa pembuang Gorong-gorong Bangunan Bangunan Rumah petugas eksploitasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

612	Pasang Surut - Bangunanpembawa • Saluran • Bangunan pintu pemasukan - Bangunan pembuang • Saluran • Bangunan pintu pembuang - Bangunan lainnya • Kolam pasang • Saluran • Bangunan • Jalan • Jembatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
613	Pengendalian Sungai Bangunan pengaman Tanggul banjir Pintu pengatur banjir Klep pengatur banjir Tembok pengaman talud Krib Kantung lumpur Chek-dam Syphon Saluranpengaman Saluran banjir Saluran drainage Corepure Bangunan lainnya Warning system Stasiun	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	614	Pengamanan Pantai - Tanggul - Krib - Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	615	Air Tanah - Stasiun pompa - Bangunan pembawa - Bangunan pembuang - Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
3	620	Jalan Kota - Daerah penguasaan - Tanah - Tanaman - Bangunan sementara - Jalan sementara - Jembatan sementara - Jembatan sementara - Kantor proyek - Gudang proyek - Barak kerja - Laboratorium lapangan - Rumah - Badan jalan - Pekerjaan tanah - Stabilitasi - Perkerasan - Lapis pondasi bawah - Lapis pondasi - Lapis permukaan - Drainage - Parit tanah - Gorong-gorong	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis

D 1 m
- Buku Trotuir
Perkerasan
• Pasangan
- Median
• Tanah
• Tanaman
Perkerasan
Pasangan
- Daerah samping
Tanaman
• Pagar
- Median
Tanah
Tanaman
Perkerasan
Pasangan
- Daerah samping
Tanaman
• Pagar
- Bangunan pelengkap dan
pengamanan
Rambu-rambu/tanda lalu
lintas
Lampu penerangan
Lampu pengatur lalulintas
Patok-patok KM
Patok-patok ROW
(Sempadan)
• Rel pengamanan
• Pagar
• Turap, penahan
- Bronjong
JO

621	Jalan Luar Kota
	- Daerahpenguasaan
	Tanah
	Tanaman
	Bangunan
	- Bangunan sementara
	Jalansementara
	Jembatansementara
	Kantorproyek
	Gedungproyek
	Barakkerja
	Laboratoriumlapangan
	• Rumah
	- Badan jalan
	Pekerjaan tanah
	Stabilisasi
	Perkerasan
	Lapispondasi
	Lapis pondasibawah
	Lapispermukaan
	Drainage
	• Parit
	Gorong-gorong
	Subdrainage
	- Trotoar
	Tanah
	Perkerasan
	- Median
	Tanah
	Tanaman
	Perkerasan
	Pasangan

		 Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan perlengkap dam pengaman Rambu-rambu / Tanda lalulintas Lampu penerangan Lampu lalulintas Patok-patok KM Patok-patok ROW Rel-rel pengaman Pagar Turap pengaman Bronjong 				
	623	Jalan Layang	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4	630	Jembatan pada Jalan Kota - Daerah penguasaan • Tanah • Tanaman • Bangunan - Bangunan sementara • Jalan sementara • Jembatan sementara • Kantor proyek • Gudang proyek • Barak kerja	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

Г	
	Laboratorium lapangan
	• Rumah
	- Pekerjaan tanah
	Galian tanah
	Timbunan tanah
	- Pondasi
	Pondasi kepala jalan
	Pondasi pilar
	• Angker
	- Bangunan bawah
	Kepala jembatan
	• Pilar
	• Piloon
	• Landasan
	- Bangunan
	Gelagar
	• Lantai
	Perkerasan
	Jalan orang/Trotoar
	• Sandaran
	• Talangair
	- Bangunan/pengaman
	• Turap/penahan
	• Bronjong Strekdam
	• Kistdam
	• Corepure
	• Krib
	- Bangunan pelengkap
	Rambu-rambu / Tanda lalu
	lintas
	• Lampu penerangan
	Lampu lalu lintas
	• Lampu latu mitas

	 Patok-patok KM Patok-patok ROW Rel-rel pengaman Pagar Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Median 				
632	Jembatan pada Jalan Luar Kota Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor proyek Gudang proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Pekerjaan tanah Galian tanah Timbunan tanah Pondasi Pondasi kepalajalan Pondasi pilar Angker Bangunan bawah	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	1		
Kepala jembatan			
• Pilar			
• Piloon			
• Landasan			
- Bangunan atas			
Gelagar			
• Lantai			
Perkerasan			
Jalan orang/Trotoar			
Sandaran			
Talang air			
- Bangunan pengaman			
Turap/penahan			
Bronjong			
Strekdam			
Kistdam			
Corepure			
• Krib			
- Bangunan pelengkap			
Rambu-rambu / Tanda lalu			
lintas			
Lampu penerangan			
Lampu lalu lintas			
Patok-patok KM			
Patok-patok ROW			
Rel-rel pengaman			
• Pagar			
- Oprit			
• Badan			
Perkerasan			
Drainage			
• Baku			

		- Median				
5	640	Bangunan Pemerintah - Gedung pengadilan - Rumah pejabat Negara - Gedung DPR - Gedung Balai Kota - Penjara - Perkantoran - Rumah Dinas	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	642	Bangunan Pendidikan - Taman kanak-kanak - SD dan Sekolah Menengah - Perguruan Tinggi - Tempat Kursus/Lembaga Pendidikan - Tempat Diklat	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	643	Bangunan Rekreasi - Bangunan OlahRaga - Gedung Kesenian - Gedung Pemancar	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	644	Bangunan Perdagangan - Pusat Perbelanjaan (Pasar, Mall, Supermarket, dept.Store) - Gedung Perdagangan - Bank - Perkantoran	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	645	Bangunan Pelayanan Umum - Mandi, Cuci, Kakus (MCK)Umum - Gedung Parkir - Rumah Sakit /Puskesmas	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	 Gedung Telkom Terminal AngkutanUdara Terminal Angkutan Air Terminal Angkutan darat Bangunan Keagamaan Halte/Shelter 				
646	Bangunan Peninggalan Sejarah - Monumen - Candi - Keraton - RumahTradisional - Heritage	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
647	Bangunan Industri	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
648	Bangunan Tempat Tinggal - RumahPerkotaan • Inti/Sederhana • Sedang/Mewah • RumahSusun - RumahPedesaan • RumahContoh - RealEstate	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
649	Elemen Bangunan - Pondasi • di atas tiang - Dinding • Penahan beban • Tidak menahan beban - Atap	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		 Lantai/Langit-langit Suspanded Solit Pintu/Jendela Pintu Harmonik Pintu biasa Pintu sorong Pintu kayu Jendela sorong Jendela vertical 				
6	650	Tata Kota Daerah Perdagangan/Pelabuhan - Daerah pusat perbelanjaan - Daerah perkotaan	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	651	Daerah Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	653	Daerah Perumahan - Kepadatan rendah - Kepadatan tinggi	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	654	Daerah Industri - Industri berat - Industri ringan - Industri rumah	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	655	Daerah Rekreasi - Taman kota - Tempat olah raga dan bermain - Ruang terbuka	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	656	Transportasi - Jaringanjalan - Peneranganjalan - Jaringan keretaapi - Jaringan sungai	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	657	Assainering - Saluran pengumpulan - Instalasi pengolahan • Bangunan • Unit Desinfektan - Unit Perpompaan	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	658	Kesehatan Lingkungan Persampahan Bangunan pengumpul Bangunan pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air buangan industri Kegaduhan/Polusi Suara Kebersihan Kota	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
7	660	Tata Lingkungan daerah Hutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	662	Daerah Pertanian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	663	Daerah Pemukiman	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

664	Pusat Pertumbuhan	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
665	Transportasi - Jaringan jalan - Jaringan kereta api - Jaringan sungai	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
8 670	 Ketenagaan Listrik Kelistrikan Kelistrikan PLN Kelistrikan non PLN Pembangkit tenaga listrik PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Transmisi tenaga listrik Gardu induk/gardu penghubung/gardu trafo 	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	 Saluran udara tegangan tinggi Kabel bawah tanah Distribusi tenaga listrik Gardu distribusi Tegangan rendah Tegangan menengah Jaringan bawah tanah Pengusahaan listrik Sambungan listrik Penjualan tenaga listrik Tarif listrik 				
672	Tenaga Air	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
673	Tenaga Minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
674	Tenaga Matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
675	Tenaga Uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
676	Tenaga Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

9	680	Peralatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
10	690	Air Minum Intake - Broncaptering - Sumur - Bendungan - Saringan - Pintu air - Saluran pembawa - Alat ukur - Perpompaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	692	Tranmisi Air Baku - Perpipaan - KatupUdara - KatupPenguras - Bak pelepastekanan - Jembatanpipa - Syphon	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	693	Instalasi Pengelolaan - Bangunan Ukur - Bangunan Aerasi - Bangunan Pengendapan - Bangunan pembubuh bahankimia - Bangunan pengaduk - Bangunan saringan - Perpompaan - Clear Hell	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

693	Instalasi Pengelolaan - Bangunan Ukur - Bangunan Aerasi - Bangunan Pengendapan - Bangunan pembubuh bahan kimia - Bangunan pengaduk - Bangunan saringan - Perpompaan - Clear Hell	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
694	Distribusi - Reservoir Menara Bawah Tanah • Menara • Reservoir di bawah tanah - Perpipaan - Perpompaan - Jembatan Pipa - Syphon - Hydran • Hydran umum • Hydran kebakaran - Katup • Katup udara • Katup pelepas - Bak Pelepas Tekanan	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN

DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BENGKULU.

VIII. PENGAWASAN

NO	KLASIFIKA SI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	PWS	PENGAWASAN				
	700	Monitoring, Pemeriksaan, Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	701	Bidang Urusan Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	702	Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis

	703	Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	704	Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/Kearsipan/ Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	705	Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	707	Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	708	Bidang Konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	709	Bidang Perjalanan Dinas	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
2	710	BIDANG PEMERINTAHAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	711	Bidang Pemerintahan Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerahunit Kerja	Bidang Teknis

712	Bidang Pemerintahan Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
713	Bidang Pemerintahan Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
714	Bidang Pemerintahan Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
715	Bidang MPR/DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
716	Bidang DPRD Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
717	Bidang DPRD Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
718	Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
719	Bidang Hubungan Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

3	720	BIDANG POLITIK				
	721	Bidang Kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis
	722	Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	723	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	724	Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	725	Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	726	Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	727	Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4	730	BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	731	Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerahunit Kerja	Bidang Teknis
	732	Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	733	Bidang Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	734	Bidang Keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	735	Bidang Kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	736	Bidang Bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	737	Bidang Kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

741	Bidang Pembangunan Desa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
742	Bidang Pendidikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis
743	Bidang Kebudayaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
744	Bidang Kesehatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
745	Bidang Agama	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
746	Bidang Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
747	Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis
748	Bidang Media Masa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

6	750	BIDANG PEREKONOMIAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerahunit Kerja	Bidang Teknis
	751	Bidang Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	752	Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	753	Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	752	Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	753	Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	754	Bidang Pertambangan/Kesamu draan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	755	Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	756	Bidang Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	757	Bidang Permodalan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	G
	758	Bidang Tentang Perbankan / Moneter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerahunit Kerja	Bidang Teknis
	759	Bidang Tentang Agraria	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	761	Bidang Pengairan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	762	Bidang Jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	763	Bidang Jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

764	Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerahunit Kerja	Bidang Teknis
765	Bidang Tata Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
766	Bidang Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
767	Bidang Ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
620	Bidang Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
761	BIDANG AIR MINUM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
762	Bidang Jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
763	Bidang Jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	764	Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit Kerja	Bidang Teknis
	765	Bidang Tata Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	766	Bidang Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	767	Bidang Ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	768	Bidang Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	769	Bidang Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	780	BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	Bidang Pengadaan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

782	Bidang Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
783	Bidang Kedudukan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
784	Bidang Kesejahteraan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
785	Bidang Cuti	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
786	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
787	Bidang Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
788	Bidang Pendidikan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

9	790	BIDANG KEUANGAN				
	791	Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	792	Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	793	Bidang Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	794	Bidang Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	795	Bidang Perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	796	Bidang Pembinaan Kebendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	797	Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	799	Bidang Perbendaharaan	Terbuka		Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	3
--	-----	-----------------------	---------	--	---	---

WALIKOTA BENGKULU, Cap/dto H. HELMI

LAMPIRAN IX

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN

DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

BENGKULU.

IX. KEUANGAN

NO	KLASIFI - KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	901	Nota Keuangan - Berkas pengantar nota keuangan APBD perubahan	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	902	APBN	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	903	APBD, RAPBD - Hibah - Bantuan Sosial	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	904	Dana Alokasi Umum - Berkas pengajuan - Penyusunan DAU - Laporan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang

	905	Dana Alokasi Khusus - Berkas pengajuan - Penggunaan DAK - Laporan Dana Bagi hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	906	Dana Cadangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	907	Penetapan dan prioritas plafon anggaran, penetapan prioritas anggaran sementara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	908	Kebijakan alokasi umum, nota kesepakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
2	910	ANGGARAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	911	Rutin/Murni - APBD murni mulai dari perencanaan program di DPRD sampai penetapan perda APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	912	Pembangunan/Kegiatan - Pengusulan anggaran pembiayaan/kegiatan - Penggunaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	913	Anggaran Belanja Tambahan/Anggaran Perubahan APBD - mulai dari perencanaan sampai penetapan perubahan APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) - Daftar Usulan Kegiatan (DUK) - Pengusulan Pra RKA - Pengusulan RKA - Pembahasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	915	Daftar Isian Proyek (DIP)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Daftar Usulan Proyek(DUP) - Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	916	Revisi Anggaran/Penyempurnaan APBD - Pengusulan realisasi APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang
	916	Revisi Anggaran/Penyempurnaan APBD - Pengusulan realisasi APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	917	Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	918	Belanja langsung/tidak langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
3	920	OTORISASI/SKO/Surat Penyediaan Dana (SPD)			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	921	Rutin/Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	922	Pembangunan/Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	924	Ralat SKO/Revisi Surat Penyediaan Dana (SPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
4	930	VERIFIKASI				
	931	SPM Rutin (Daftar P8)/SPM Murni, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	933	SPM Pembangunan (Daftar P8)/SPM Kegiatan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	934	Penerimaan (Daftar P6. P7)/Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	935	SPJ Rutin/SPJ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	936	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	937	SP Pemindahan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
5	940	PEMBUKUAN				Sekretariat, Bidang
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	943	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) - Neraca - Catatan anggaran laporan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
6	950	PERBENDAHARAAN				Sekretariat, Bidang
	951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74) /Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	953	Penghapusan Kekayaan Negara - Aset Daerah - Aset bergerak - Aset tidak bergerak - Aset tidak berwujud	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek / PPTK dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	955	Specimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	957	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
7	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	963	Laporan Keuangan Bendaharawan - Laporan keuangan bulanan - Laporan keuangan tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
8	970	PENDAPATAN - Pendapatan asli daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	972	Subsidi	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH, PBB	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	974	Retribusi	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	974	Retribusi	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretar iat, Bidang
	975	Bea	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	976	Cukai	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	977	Pungutan	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang

	978	Bantuan Presiden, Menteri, Bantuan Propinsi, Bantuan Pemerintah, dan Bantuan lainnya.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	979	Pendapatan Perusahaan Milik Negara/Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
9	980	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
10	990	BENDAHARAWAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	991	SKPP/SPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI